

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN CILACAP

2.1. Gambaran Umum Daerah dan Kondisi Kependudukan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang letaknya berada di sebelah barat daya Provinsi Jawa Tengah dan menjadi kabupaten terluas hingga mencapai 6,48 persen bagian dari keseluruhan luas provinsi tersebut. Adapun luas Kabupaten Cilacap dalam kisaran angka sekitar 2.253,61 kilometer persegi atau 225.361 hektare (terhitung dengan Pulau Nusakambangan yaitu seluas 115,11 kilometer persegi atau 11.511 hektare).²⁷

Secara astronomis, Kabupaten Cilacap terletak pada 7°30'–7°45'20" Garis Lintang Selatan dan 108°4'30"–109°30'30" Garis Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di sebelah utara, Kabupaten Kebumen di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Secara topografi, Kabupaten Cilacap memiliki kondisi yang beragam antara lain dataran rendah, perbukitan, dan pesisir. Akan tetapi, topografi Kabupaten Cilacap didominasi oleh dataran rendah yang terlihat di sebagian besar kecamatan.²⁸

Ditinjau secara administrasi daerah, Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan yang meliputi 269 desa dan 15 kelurahan.²⁹ Selain itu, di kabupaten tersebut terdapat 2.319 rukun warga dan 10.463 rukun tetangga.³⁰ Luas Kecamatan Wanareja tercatat sebesar 195,92 kilometer persegi atau 19.592 hektare,

²⁷Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026*, Cilacap: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022.

²⁸Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, *Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022*, Cilacap: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, 2022, hlm. 7–8.

²⁹Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, *Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018*, Cilacap: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2018.

³⁰Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, *op.cit.*, hlm. II-3.

menjadikannya kecamatan terluas di Kabupaten Cilacap.³¹ Di sisi lain, Kecamatan Dayeuhluhur berjarak 105 kilometer dari pusat kabupaten, menjadikannya kecamatan dengan lokasi paling jauh dari pusat pemerintahan daerah.³²

Merujuk pada proyeksi jumlah penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 15 tahun mulai tahun 2020 yang disusun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2023 diperkirakan sebanyak 2.007.829 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa secara demografis, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin diklasifikasikan ke dalam kelompok laki-laki dan kelompok perempuan masing-masing sebanyak 1.011.586 jiwa dan 996.243 jiwa yang mencerminkan adanya selisih populasi antara keduanya, dengan laki-laki menempati proporsi lebih tinggi.

Dalam rentang tahun 2020–2023, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 0,01 persen, mengindikasikan tren pertumbuhan yang berlangsung relatif stabil. Sementara itu, rasio jenis kelamin tahun 2023 tercatat pada angka 102, merepresentasikan 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2023, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 893 jiwa per kilometer persegi. Sebaran kepadatan penduduk antar kecamatan bervariasi. Umumnya daerah bagian timur serta kecamatan-kecamatan di sekitar pusat kabupaten memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan daerah bagian barat. Kecamatan Cilacap Selatan adalah daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 10.554 jiwa per kilometer persegi.³³

Keadaan agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Cilacap berdasarkan data per kecamatan tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam dengan totalnya berjumlah 2.006.687 jiwa. Di samping itu, terdapat pemeluk agama non-Islam antara lain Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan penganut kepercayaan lainnya. Keberagaman agama lebih tampak di pusat

³¹Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Wanareja Dalam Angka Wanareja Subdistrict In Figures 2023*, Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2023.

³²Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Tinggi Wilayah Kecamatan dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten*, Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2023.

³³Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kabupaten Cilacap Dalam Angka Cilacap Regency In Figures 2024*, Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2024.

kabupaten meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap Utara.

Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Kroya juga menggambarkan keberagaman agama meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Adapun Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Sampang tergolong relatif homogen karena hampir seluruh penduduknya beragama Islam.³⁴ Pola ini mencerminkan adanya perbedaan agama lebih banyak ditemukan di bagian daerah yang jumlah penduduknya besar, mencakup pusat kabupaten dan sejumlah kecamatan lainnya. Sedangkan, daerah pedalaman cenderung memiliki struktur keagamaan yang lebih seragam dengan dominasi pemeluk agama Islam.

2.2. Terbentuknya Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia

Pembahasan sejarah pembentukan Muslimat Nahdlatul Ulama di kabupaten Cilacap didahului penjelasan mengenai proses pembentukannya di tingkat pusat. Proses terbentuknya Muslimat Nahdlatul Ulama melalui 3 tahap penting yakni tahap pertama, saat masih berupa jama'ah Nahdlatul Ulama. Tahap kedua, ketika berkembang sebagai bagian dari kelompok perempuan Nahdlatul Ulama. Tahap ketiga, Muslimat Nahdlatul Ulama ditetapkan secara resmi menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama.

Kaum perempuan dari Muslimat Nahdlatul Ulama disebut sebagai anggota jama'ah karena kehadiran mereka dalam forum-forum Mukhtar Nahdlatul Ulama hingga tahun 1952 belum disertai dengan hak memilih dan dipilih. Pada masa itu, perempuan hanya diberikan hak untuk menyimak dan menyampaikan saran/pandangan, tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Hak partisipasi penuh baru diperoleh setelah Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang.³⁵

Wacana mengenai keterlibatan perempuan dalam Nahdlatul Ulama sebenarnya muncul sejak Mukhtar Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 1937. Pada saat mukhtar tersebut berlangsung, istilah Nahdlatul Ulama Muslimat telah dikenal dan

³⁴*Ibid.*, hlm. 155.

³⁵Asmah Sjahrani, *et al.*, *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara & Bangsa*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 1996, hlm. 18.

Nyai Hajjah Chasanah Mansjur diketahui sebagai bagian dari tokoh yang terlibat di dalamnya. Hal itu menjadi salah satu faktor yang menggugah semangat kalangan perempuan Nahdlatul Ulama untuk hadir pada Mukhtar ke-13 di Menes yang diselenggarakan tanggal 11–16 Juni 1938 guna mendorong terbentuknya wadah organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pada Mukhtar ini pula, untuk pertama kalinya 2 tokoh perempuan yaitu Nyai Hajjah Djuaesih dari Bandung dan Hajjah Siti Sarah dari Menes tampil menyampaikan pentingnya pembentukan organisasi bagi perempuan Nahdlatul Ulama secara langsung dalam forum mukhtar.³⁶

Putusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-15 di Surabaya memberikan dorongan kuat bagi pengembangan organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mukhtar tersebut menetapkan pengesahan Nahdlatul Ulama Muslimat, pengesahan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Muslimat, pembentukan kepengurusan tingkat pusat Nahdlatul Ulama Muslimat, penetapan daftar materi pelajaran untuk tingkat Madrasah Banat, serta rencana penerbitan majalah bulanan Nahdlatul Ulama Muslimat sebagai sarana informasi dan komunikasi organisasi.³⁷

Muslimat Nahdlatul Ulama menyertai pembentukan cabang-cabang Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-16 di Purwokerto yang diselenggarakan tanggal 26–29 Maret 1946 menetapkan keputusan penting yang berbunyi: “Menerima baik usul untuk menjadikan Muslimat sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang kemudian disahkan dan diresmikan dalam rapat pleno tanggal 26 Rabiul Akhir 1365/29 Maret 1946 suatu organisasi Nahdlatul Ulama Muslimat dengan singkatan NUM”.³⁸ Selain menetapkan pengesahan organisasi tersebut, dalam mukhtar ini juga memilih Nyai Hajjah Chadidjah Dahlan dari Pasuruan sebagai Ketua Umum.³⁹

Sebelum menjadi Badan Otonom, Muslimat Nahdlatul Ulama berada di bawah koordinasi langsung Nahdlatul Ulama dan merujuk pada keputusan organisasi induk

³⁶Sri Mulyati, *et al.*, *70 Tahun Muslimat NU Kiprah & Karya Perempuan NU*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 2016, hlm. 3–4.

³⁷Solichah Saifuddin Zuhri, *et al.*, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 1979, hlm. 44–45.

³⁸Sri Mulyati, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 9.

³⁹Lies Marcoes-Natsir, *et al.*, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca-Orde Baru*, Cirebon: Institut Studi Islam Famina, 2012, hlm. 82.

dalam menangani berbagai persoalan keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebangsaan.⁴⁰ Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-4 yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang tanggal 28 April–1 Mei 1952 adalah momentum penting dalam perjalanan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama. Pada forum ini, status Muslimat Nahdlatul Ulama yang sebelumnya bersifat semi otonom yang berarti sebagai bagian dari kelompok perempuan Nahdlatul Ulama secara resmi ditingkatkan menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama.⁴¹

Perubahan status ini juga mempengaruhi penyesuaian nama organisasi yang semula Nahdlatul Ulama Muslimat menjadi Muslimat Nahdlatul Ulama. Status sebagai Badan Otonom memberikan keleluasaan struktural bagi Muslimat Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, memperluas jejaring organisasi, serta melaksanakan program-program pemberdayaan di masyarakat.⁴² Setelah memperoleh status sebagai Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan peranan dan aktivitasnya untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan mendukung cita-cita kebangsaan secara mandiri.⁴³ Keterlibatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk tetap dimungkinkan, namun terbatas pada hal-hal tertentu yang memang memerlukan koordinasi bersama.⁴⁴

2.3. Pembentukan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap

Sebelum pendirian Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap, masyarakat setempat umumnya telah terbiasa melakukan aktivitas yang mencerminkan hakikat Ahlussunnah Wal Jama'ah dan perealisasiannya dipimpin para ulama di Kabupaten Cilacap. Pendirian Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap salah satunya dipelopori oleh Kyai Haji Adzkiya 1931 yang berasal dari Kecamatan Kroya. Selain sebagai pelopor dari pendirian organisasi, beliau juga merupakan tokoh yang pertama kali menjabat sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap.⁴⁵

⁴⁰Asmah Sjahrani, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 24.

⁴¹Solichah Saifuddin Zuhri, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 63.

⁴²Sri Mulyati, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 12.

⁴³Lailatus Syukriyah, "Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)", *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 615.

⁴⁴Asmah Sjahrani, *et al.*, *loc.cit.*

⁴⁵Arsip Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Profil PCNU Cilacap*, Cilacap: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, 2019.

Bukti pendukung terkait pendirian Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap adalah lembar *Berita Nahdlatul Ulama Warta Officieel* dari H.B.N.O. yang memuat nama Tjilatjap urutan nomor 28 termasuk ke dalam Tjabang Hoofd Bestuuer Nahdlatul Ulama yang sekarang penamaannya telah berubah menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian, pada halaman yang sama tepatnya bagian kanan atas terdapat keterangan berupa kalimat “Kirim oetoesan Congres ke 11” yang bermakna jumlah utusan yang dikirim untuk mengikuti kongres tersebut oleh setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Utusan dari perwakilan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap pada Mukhtar Nahdlatul Ulama yang ke-11 yaitu sebanyak 2 orang. Mukhtar yang dimaksud ialah Mukhtar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di luar Pulau Jawa untuk pertama kalinya yakni di Banjarmasin tahun 1936. Maka dari itu, Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap telah ada dan berdiri organisasinya tahun 1936 atau bahkan tahun-tahun yang sebelumnya.⁴⁶

Pembentukan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cilacap berawal dari kegiatan pengajian yang dirintis sekitar tahun 1960-an. Pada masa tersebut, seorang perempuan bernama Asfiah memulai kegiatan pengajian di beberapa tempat. Kegiatan pengajian ini semakin menguat dengan kehadiran Kasiatin Supardi dan Rasmah Soemarsih Moedianto. Keduanya memiliki semangat besar mengembangkan kegiatan perempuan Nahdlatul Ulama dan terlibat dalam pengajian-pengajian yang telah berjalan.

Kegiatan itu menjadi wadah awal bagi perempuan Nahdlatul Ulama untuk berkumpul dan memperdalam pemahaman keagamaan. Kehadiran kedua tokoh ini mendorong kegiatan pengajian lebih meluas. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengajian dan peserta semakin bertambah terutama di pusat kabupaten Cilacap. Pada akhir tahun 1965 atau awal tahun 1966, juga hadir Hariswati Slamet Priyadi yang merupakan pendatang dari Kecamatan Rowalo, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, Hariswati Slamet Priyadi mempunyai riwayat keorganisasian yakni Fatayat Nahdlatul

⁴⁶Tim Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Materi Konfercab NU Cilacap*, Cilacap: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, 2024, hlm. 21-22.

Ulama Kabupaten Banyumas yang menjadi modal penting dalam proses pembentukan organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cilacap.

Dengan dukungan tokoh-tokoh perempuan Nahdlatul Ulama lain yang telah aktif, maka pada tahun 1966 dibentuk secara resmi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap sekaligus penetapan susunan kepengurusan periode pertama organisasi di bawah kepemimpinan Hariswati Slamet Priyadi. Pembentukan Pimpinan Cabang ini menandai perubahan dari kegiatan pengajian yang bersifat informal menjadi organisasi yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama.⁴⁷

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelompokan organisasi kemasyarakatan tahun 1967. Aturan tersebut melarang para pegawai negeri, guru, pegawai Badan Usaha Milik Negara, serta istri pegawai negeri untuk bergabung dengan organisasi yang tidak bersifat fungsional. Golongan ini hanya diperkenankan menjadi anggota yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pengelompokan fungsional seperti para guru yang diwajibkan untuk masuk ke dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Sementara itu, istri pejabat pemerintah mulai dari gubernur hingga lurah beserta jajarannya diarahkan ke organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Kebijakan ini berdampak langsung pada Muslimat Nahdlatul Ulama disebabkan basis anggotanya yang banyak berasal dari kalangan guru, pegawai negeri, maupun istri pegawai negeri. Akibatnya, banyak anggota yang harus meninggalkan Muslimat Nahdlatul Ulama sehingga mengakibatkan melemahnya struktur keanggotaan. Sejumlah cabang membubarkan diri dan kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama di berbagai daerah mengalami kevakuman.⁴⁸

Masa awal keberadaan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap untuk bidang yang dipengaruhi oleh organisasi berkaitan dengan bidang dakwah seperti pengajian dan menghadiri pertemuan. Kondisi organisasi pada saat itu belum begitu menunjukkan adanya perkembangan disebabkan juga oleh kebijakan pemerintah yang berlaku saat itu sehingga Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap

⁴⁷Wawancara dengan Nasirottuddiniyah Ahmad Masduki, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap.

⁴⁸Sri Mulyati, *et al.*, *op.cit*, hlm. 36.

masih dalam keadaan pasif mengingat latar belakang suami dari anggota utama kepengurusan periode pertama termasuk ke sasaran kebijakan pengelompokan organisasi kemasyarakatan fungsional.

Tokoh perempuan yang kemudian melanjutkan keberlangsungan organisasi adalah Nasirottudiniyah Ahmad Masduki. Beliau datang ke Kabupaten Cilacap untuk mengikuti suami setelah menikah tahun 1971. Nasirottudiniyah Ahmad Masduki diberikan amanah untuk mengelola kembali Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cilacap oleh Haji Nur Hasyim yang merupakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap kala itu. Meskipun masih berusia muda yakni 23 tahun dan masih berada di lingkungan Fatayat Nahdlatul Ulama, pengalaman organisasinya membuat beliau dipercaya untuk meneruskan kepengurusan. Per tahun 1972, terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Cilacap yang memiliki kepengurusan aktif Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama yaitu Kecamatan Cilacap Utara (Muara Khotib), Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja.⁴⁹

Kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Muslimat Nahdlatul Ulama. Setelah Khittah 1926 ditetapkan, Muslimat Nahdlatul Ulama memiliki keleluasaan dan keluwesan yang lebih dalam berkiprah. Hal ini terlihat dari meningkatnya perkembangan organisasi serta intensitas pelaksanaan program pada periode 1983–1995.⁵⁰ Sejak tahun 1984–1994, Kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cilacap berkembang pesat. Kegiatan yang semula hanya aktif di 6 kecamatan meluas hingga mencakup 19 kecamatan. Setelah tahun 1994, seiring terjadinya pemekaran wilayah seperti terbentuknya Kecamatan Patimuan dan Kecamatan Maos, jumlah Pimpinan Anak Cabang bertambah menjadi 24 dengan 284 Pimpinan Ranting di tingkat desa/kelurahan.⁵¹

Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap memiliki visi dan misi sesuai dengan Pimpinan Pusat sebagaimana termuat dalam materi Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-16 di Bandar Lampung yang diselenggarakan

⁴⁹Wawancara dengan Nasirottudiniyah Ahmad Masduki, *loc.cit.*

⁵⁰Asmah Sjahrini, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 96.

⁵¹Wawancara dengan Nasirottudiniyah Ahmad Masduki, *loc.cit.*

tanggal 13–18 Juli 2011, berlaku sebagai pedoman organisasi kaitannya arah gerakan dan perealisasi program dari berbagai bidang di daerah. Visi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan berlandaskan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan, serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sedangkan, Misi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap antara lain sebagai berikut.

1. Mengupayakan terbentuknya masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang memiliki kesadaran dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Membentuk perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
3. Menumbuhkan kesadaran perempuan Indonesia mengenai hak dan kewajiban menurut ajaran Islam baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan organisasi Nahdlatul Ulama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang adil, makmur, merata, serta diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁵²

Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap pada masa awal keberadaannya masih berfungsi sebagai organisasi yang bersifat fungsional dan sederhana, dengan fokus utama pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pertemuan tertentu. Kebijakan pemerintah Orde Baru menunjukkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap praktik organisasi. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926, organisasi tidak lagi hanya menjalankan fungsi kegiatan. Tetapi, membangun struktur yang lebih stabil, memperluas jaringan kepengurusan, serta memperkuat legitimasi sosial di tengah masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Cilacap berkembang menjadi suatu institusi perempuan yang memiliki

⁵²Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Materi Kongres XVI Muslimat Nahdlatul Ulama Revitalisasi Institusi Layanan Muslimat NU, Hidmah Untuk Perempuan Indonesia Asrama Haji Bandar Lampung, 13–18 Juli 2011*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 2011.

identitas, nilai, dan budaya organisasi yang relatif mapan, sesuai dengan teori institusional dari Philip Selznick.